

Jurnal **ekowisata**

ISSN: 1978-452X

Edisi VIII - November 2009



Potensi DAS Tondano dalam Pengembangan Wisata Kota Manado



**Metode Penilaian
Potensi Ekowisata
di Suatu Kawasan Pesisir**

Jurnal **ekowisata**

ISSN: 1978-452X

DEWAN REDAKSI

Penyunting Utama/Penanggung-jawab:

Audy A. G. Supit, S.IK., M.Si.

Penyunting Pelaksana:

Dannie R. S. Oroh, S.Pi.

Tommy M. Kontu, S.Pi.

Penyunting Penyelia:

Margaretha N. Warokka, SE, MBA.

Sekretaris Penyunting:

Easter Ch. Tulung, SIK.

Penyunting Tamu:

Ais Kai

PENELAAH AHLI:

Prof. Dr. Ir. Rizald M. Rompas, M.Agr.

Prof. Dr. Ir. Janny D. Kusen, M.Sc.

Dr. Ir. Soehartini Sekartjagrarni, M.Sc.

Lay-out:

Aka

Alamat Sekretariat:

Gedung Jurusan Pariwisata

Politeknik Negeri Manado

Jl. Kampus Ds.Buha, Mapangot

Kota Manado, Sulut 95252

Telefon: 0431-814249

Faksimili: 0431-815192

E-mail: jurnalekowisata@yahoo.com

Penerbit:

Politeknik Negeri Manado

Catatan Pengantar

Jurnal Ekowisata hadir kembali.

Jurnal kebanggaan Politeknik Negeri Manado ini sudah delapan kali menemani Anda. Berarti sudah lebih dari dua tahun Jurnal Ekowisata bersama dengan Anda, memberikan ragam informasi dan pengetahuan mengenai sumberdaya alam dan kepariwisataan.

Kehadiran Jurnal Ekowisata sampai saat ini tak lepas dukungan dari berbagai pihak. Karenanya, penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada mereka yang terlibat menyiapkan dan menyelesaikan sampai edisi terakhir ini. Semoga dukungan dan keterlibatan para pihak ini terus berlanjut pada terbitan berikutnya.

Pada terbitan saat ini, ada tujuh tulisan ditampilkan, yang berupa hasil penelitian maupun pemikiran. Tulisan-tulisan ini terutama sebagai bagian dari sumbang-pikir dalam memperkuat strategi dan tindak-langkah pengelolaan sumberdaya alam, serta pengembangan kepariwisataan di daerah ini, bahkan Indonesia.

Akhirnya, sambil mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha-Kuasa, Jurnal Ekowisata kami tampilkan buat Anda sekalian.

Salam,

Penyunting.

Daftar Isi

Catatan Pengantar

Daftar Isi

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Potensi DAS Tondano
dalam Pengembangan
Wisata Kota Manado
Benny I. Towoliu
dan Pearl L. Wenas
(Politeknik Negeri Manado) | 23 | Metode Penilaian
Potensi Ekowisata
di Suatu Kawasan Pesisir
Oktavianus Lintong
(Politeknik Negeri Manado) |
| 7 | Pengembangan Wisata Bahari
Secara Berkelanjutan
di Kota Manado
Diana O. Rondonuwu
(Politeknik Negeri Manado) | 31 | Alur Kerangka Teori
Pemanfaatan Kawasan Pesisir
untuk Ekowisata
Jenly A. Solang
(Politeknik Negeri Manado) |
| 17 | Pengembangan Ekowisata
Berkas Gunung
di Sulawesi Utara
(Tinjauan dari Aspek Ekonomi)
Henry Kumaat
(Politeknik Negeri Manado) | 37 | Beberapa Pendekatan
dalam Menata Ruang Laut
Secara Terpadu
Altje E. Tuwaidan
(Politeknik Negeri Manado) |
| | | 43 | Pengelolaan Ekowisata;
Konsep dan Kebijakan
yang Berkembang
Telly H.I. Kondo
(Politeknik Negeri Manado) |

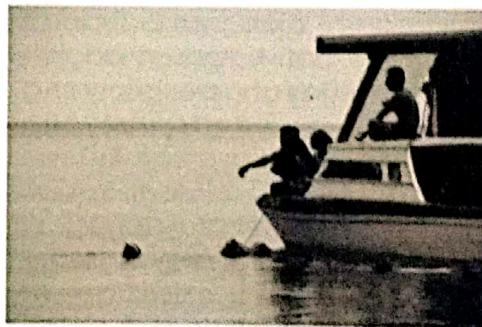
Alur Kerangka Teori Pemanfaatan Kawasan Pesisir untuk Ekowisata

Jenly A. Solang

(Politeknik Negeri Manado)

Abstract

Coastal zone have a variety of resources. This resource is used for various purposes. Some experts classify the use of coastal resources in three categories: natural resources utility, space, and environmental services. This paper describes theoretical flow of how a coastal zone used as ecotourism.



dok lestari

Kata kunci: pemanfaatan, pesisir

Pendahuluan

Umumnya literatur menggunakan istilah wilayah pesisir, dibandingkan dengan istilah kawasan pesisir. Wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Definisi ini merupakan kesepakatan umum yang berlaku di seluruh dunia, sebab sampai saat ini belum ada definisi yang baku (Dahuri dkk.,

2008). Bila pendefinisian dihubungkan dengan penentuan batas-batas, maka menurut kesepakatan internasional terakhir, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua

(Beatley et al., 1994 dalam Dahuri dkk., 2008). Dahuri dkk (2008) selanjutnya mengemukakan bahwa dalam Rapat Kerja Nasional Proyek MREP (*Marine Resource Evaluation and Planning*) di Manado, 1-3 Agustus 1994, telah ditetapkan batas ke arah laut suatu wilayah pesisir adalah sesuai dengan batas laut yang terdapat dalam Peta Lingkungan Pantai Indonesia (PLPI) dengan skala 1:50.000 yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), sedangkan batas ke arah darat adalah mencakup batas administratif seluruh desa pantai.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya. Dengan demikian, kawasan pesisir dapat didefinisikan sebagai bagian wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu dan ditetapkan berdasarkan kriteria tersebut.

Sumberdaya Pesisir

Dalam suatu kawasan pesisir terdapat satu atau lebih sistem lingkungan (ekosistem) dan sumberdaya pesisir. Ekosistem pesisir dapat bersifat alami ataupun buatan. Ekosistem alami yang terdapat di kawasan pesisir antara lain adalah terumbu karang, mangrove, padang lamun, pantai berpasir, estuaria, laguna, dan delta. Ekosistem buatan

antara lain tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan agroindustri, dan kawasan pemukiman (Dahuri dkk, 2008).

Selanjutnya Dahuri dkk (2008) dan Bengen (2002) mengungkapkan bahwa sumberdaya di wilayah pesisir terdiri dari sumberdaya alam yang dapat pulih, dan sumberdaya alam yang tak dapat pulih. Sumberdaya alam yang dapat pulih antara lain sumberdaya perikanan (plankton, bentos, ikan, moluska, krustasea, mamalia laut), rumput laut, padang laut, mangrove, dan terumbu karang. Sumberdaya tak dapat pulih misalnya minyak dan gas, biji besi, pasir, timah, mineral dan bahan-bahan tambang lain.

Sulistiyo (2002) berpendapat bahwa sumberdaya pesisir dapat dibedakan atas sumberdaya perairan pesisir dan daratan pesisir. Sumberdaya perairan pesisir meliputi semua yang ada di wilayah perairan, misalnya sumberdaya ikan, terumbu karang, mangrove, atau kandungan mineral di dasar perairan. Sumberdaya daratan pesisir meliputi semua yang ada di wilayah darat yang masih termasuk dalam kawasan pesisir, seperti hutan, perkebunan, atau bahkan perairan tawar.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 menetapkan sumberdaya pesisir dan laut terdiri atas sumberdaya hayati, sumberdaya nirhayati, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Sumberdaya hayati misalnya ikan, karang, bentos, dan sebagainya. Sumberdaya nirhayati seperti pasir, mineral, minyak, dan bahan tambang. Sumberdaya buatan misalnya dermaga, pemecah ombak, dan infrastruktur laut lainnya. Keindahan alam, energi, dan pemanfaatan lain dikategorikan sebagai jasa lingkungan.

Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir

Bila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007, maka pemanfaatan sumberdaya pesisir meliputi pemanfaatan sumberdaya alam, pemanfaatan ruang, dan pemanfaatan jasa lingkungan. Sumberdaya alam meliputi sumberdaya hayati dan nirhayati. Ikan, karang, bentos, mineral, dan bahan tambang yang dieksploitasi, dikategorikan sebagai pemanfaatan sumberdaya alam kawasan pesisir. Pembangunan infrastruktur laut, perhubungan laut, dan pemukiman di pesisir, dikategorikan sebagai pemanfaatan ruang.

Salah satu bentuk pemanfaatan kawasan pesisir yang sangat berkembang akhir-akhir ini adalah jasa lingkungan. Pada dasarnya pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan pesisir tak terlepas dari keberadaan sumberdaya alam (Dahuri dkk, 2008). Keindahan, keunikan, dan kapasitas alam, diolah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Potensi-potensi lingkungan tersebut berperan memberikan jasa, dan karena itulah dirumuskan sebagai jasa lingkungan.

Pariwisata dipandang sebagai salah satu bentuk jasa lingkungan. Potensi alam dan lingkungan diolah dan dikembangkan untuk memberikan jasa bagi manusia. Jasa tersebut berupa kesenangan (*plaisure*) dan kepuasan semata, atau untuk tujuan-tujuan khusus yang lebih dari itu (Darsoprajitno, 2002).

Definisi Pariwisata

Beberapa ahli mendefinisikan Pariwisata dengan formulasi yang berbeda-beda. Yoeti (1992) menyatakan pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah

serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung lainnya. Spillane (1999) menyederhanakan pengertian pariwisata sebagai suatu kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan lain-lain. Menurut Sihite dalam Yoeti (1992), pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990, tentang Kepariwisata, mendefinisikan pariwisata sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Undang-undang ini pula mendefinisikan Wisata sebagai kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

Dengan demikian pariwisata meliputi tiga aspek. Pertama, semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata. Kedua, pengusahaan objek dan daya tarik wisata, seperti kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, waduk, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat, dan yang

bersifat alamiah, misalnya keindahan alam, gunung berapi, danau, pantai dan sebagainya. Ketiga, perusahaan jasa dan sarana pariwisata, yang meliputi: a) usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, impresariat, konsultan pariwisata, informasi pariwisata); b) usaha sarana pariwisata yang terdiri dari : akomodasi, rumah makan, bar, angkutan wisata dan sebagainya; dan c) usaha-usaha jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata.

Konsep Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Sebagai salah satu bentuk pemanfaatan jasa lingkungan, maka pariwisata yang hendak dikembangkan haruslah memperhatikan secara serius kelestarian lingkungan. Logikanya, keuntungan diperoleh melalui jasa yang diberikan lingkungan, dengan demikian lingkungan itu harus tetap dijaga keberadaannya agar seterusnya dapat memberikan jasa itu. Ide dasar pembangunan berkelanjutan adalah kelestarian sumberdaya alam dan budaya. Sumberdaya tersebut merupakan kebutuhan setiap orang saat sekarang supaya dapat hidup dengan sejahtera, tetapi harus dipelihara dan dilestarikan agar dapat juga digunakan di masa yang akan datang (Damanik & Weber, 2006). Dalam hal ini, program-program pembangunan diwujudkan dalam bentuk pembatasan secara ketat eksploitasi sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui dan pemanfaatan sumberdaya tanpa menyisakan kerusakatan lingkungan hidup secara permanen. Pemanfaatan sumberdaya tersebut harus pula melibatkan masyarakat lokal dan

memberikan manfaat optimal bagi mereka.

Ide-ide itu kemudian diturunkan ke dalam konsep pariwisata berkelanjutan. Artinya adalah pembangunan sumberdaya (atraksi, aksesibilitas, amenitas) pariwisata yang bertujuan untuk memberikan keuntungan optimal bagi pemangku kepentingan dan nilai kepuasan optimal bagi wisatawan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, kalau yang ingin dikembangkan adalah infrastruktur pariwisata, maka itu harus memberikan keuntungan jangka panjang bagi semua pelaku wisata. Dalam hal ini, kualitas jasa dan layanan yang dihasilkan dalam pengembangan tersebut harus terjamin, supaya wisatawan yang menggunakannya dapat memperoleh kepuasan yang optimal. Kepuasan wisatawan tentu saja akan ditukarkan ke dalam bentuk keuntungan para pemangku kepentingan (Damanik & Weber, 2006).

Konsep Ekowisata

Sejak permulaan tahun 1990-an, berkembang pesat peristilahan baru dalam bidang pariwisata, yaitu ekowisata atau ekoturisme (*ecotourism*). Istilah ini merujuk pada suatu semangat untuk mengedepankan pengelolaan alam dan lingkungan hidup sebagai nilai jual pariwisata (Ceballos-Lascurain, 1996; TIES, 1991). Paham dan semangat ekowisata memandang bahwa yang hendak ditawarkan sebagai objek wisata, bukanlah alam dan lingkungan hidup semata, tetapi upaya pengelolaan dan pemeliharannya yang sungguh-sungguh. Atraksi wisata yang ditawarkan dalam model pariwisata bersemangat ekowisata ialah kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pelestarian alam, bukanlah alam itu

sendiri.

Beberapa ahli merumuskan definisi ekowisata dengan kalimat yang berbeda-beda, namun pada dasarnya mengandung esensi yang sama. Menurut Fandeli (2005), ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami (*natural area*), memberi manfaat secara ekonomi, dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat setempat. Ekowisata adalah bentuk baru dari kegiatan wisata, yaitu perjalanan bertanggung jawab ke area alami dan berpetualang, yang dapat menciptakan industri pariwisata (Eplerwood, 1999). Wood (2002) mendefinisikan ekowisata sebagai bentuk usaha atau sektor ekonomi wisata alam yang dirumuskan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Ekowisata adalah sebagian dari *sustainable tourism*, yakni sektor ekonomi yang lebih luas dari *ecotourism* dan mencakup sektor-sektor pendukung kegiatan *tourism* secara umum.

Ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor/usaha ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal, serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan (Nugroho, 2004).

Beberapa lembaga yang berkaitan dengan ekowisata, juga memiliki definisi sendiri-sendiri tentang ekowisata. *Australian Departement of Tourism* mendefinisikan ekowisata sebagai wisata berbasis pada alam dengan mengikuti aspek pendidikan, interpretasi lingkungan alami dan budaya masyarakat, dengan pengelolaan kelestarian ekologis (Black, 1999 dalam Fandeli, 2005).

Menurut *The International Eco-tourism Society (TIES)* (1991), ekowisata adalah perjalanan wisata ke wilayah-wilayah alami dalam rangka mengonservasi atau menyelamatkan lingkungan, dan memberi penghidupan penduduk lokal. *World Conservation Union* (1991), ekowisata adalah perjalanan wisata ke wilayah-wilayah yang lingkungan alamnya masih asli, dengan menghargai warisan budaya dan alamnya, mendukung upaya-upaya konservasi, tidak menghasilkan dampak negatif, dan memberikan keuntungan sosial ekonomi serta menghargai partisipasi penduduk lokal.

Pada tahun 2002, bertepatan dengan Tahun Ekowisata Dunia, anggota TIES mengadakan pertemuan di kota Quebec Kanada, dan mengeluarkan deklarasi tentang ekowisata, yang disebut sebagai Deklarasi Québec. Dalam deklarasi ini disebutkan bahwa ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang mengadopsi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Secara praktis ekowisata akan tergambar dalam bentuk kegiatan wisata yang secara aktif menyumbang kegiatan konservasi alam dan budaya; melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan mereka; dan dilakukan dalam bentuk wisata independen atau diorganisasi dalam bentuk kelompok kecil.

Penutup

Berkaitan dengan strategi pengembangan pariwisata, maka penting untuk mencermati perkembangan industri pariwisata dunia yang sedang terjadi. Tren industri pariwisata dunia semakin berkembang ke arah pariwisata berkelanjutan. Sejak awal tahun

1990, sangat berkembang semangat ekowisata dalam perkembangan industri wisata dunia (Ceballos-Lascurain, 1996; TIES, 1991). Tren ini sejalan dengan semangat masyarakat dunia yang semakin menghargai konservasi alam dan budaya, sehingga semua aspek pembangunan industri dan ekonomi, dikembangkan dengan semangat konservasi. Eplerwood (1999) mengungkapkan bahwa ekowisata akan menjadi industri wisata baru menggantikan wisata masal. Hal ini mulai terbukti, sebab lebih dari 30 % industri wisata dunia telah berkembang ke arah ekowisata, dengan cenderung yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Fandeli, 2005).

Daftar Pustaka

- Bengen, D.G. 2002. Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolannya. PK-SPL. IPB, Bogor.
- Ceballos-Lascurain, H. 1996. *Tourism, Ecotourism, and Protected Area*. Gland, Switzerland: IUCN.
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P. dan M. J. Sitepu, 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Damanik, J. dan H. F. Weber, 2006. *Perencanaan Ekowisata. Dari Teori ke Aplikasi*. Pusat Studi Pariwisata UGM & Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Darsoprajitno, S. 2002. *Ekologi Pariwisata. Tata Laksana Pengelolaan Objek dan Daya Tarik Wisata*. Penerbit Angkasa, Bandung.
- Eplerwood, M. 1999. *Successful Ecotourism Business. The Right Approach*. Word Ecotourism Conference, Kinabulu City, Sabah.
- Fandeli, C. 2005. *Ekowisata. Sinopsis Elektronik*. Diunduh tanggal 15 Oktober 2009.
- Nugroho, I. 2004. *Buku Ajar Ecotourism. Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Widyagama Malang*.
- Sekretariat Negara: Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007. Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Sekretariat Negara: Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990. Tentang Kepariwisata.
- Spillane, J. J. 1999. *Pariwisata Sebagai Ilmu dan Profesi*. Jurnal Ilmu Pariwisata, ISSN 1411 1527. Vol.4 No.2 November 1999: 20 – 26 pp
- Sulistiyo, B. 2004. *Menata Wilayah Laut. Bab 2 dari Buku Menata Ruang Laut Terpadu*. Penerbit PT Pradnya Paramitha, Jakarta.
- The International Ecotourism Society*, 1991. *TIES Global Ecotourism Fact Sheet*. UNEP Tourism. www.unep.org/tourism/library/ecotourism.htm diunduh 12 Oktober 2009.
- Wood, M. E. 2002. *Ecotourism: Principles, Practices and Policies for Sustainability*. UNEP. <http://www.unepie.org/tourism/library/ecotourism.htm> diunduh 20 Oktober 2009.
- World Conservation Union (1991) *Sustainable Tourism in Protected Areas. Guidelines for Planning and Management*. IUCN – The World Conservation Union, 2002, World Commission on Protected Areas (WCPA)
- Yoeti, O. A. 1992. *Pengantar Pariwisata*. Penerbit Angkasa, Bandung.

Pengelolaan Ekowisata; Konsep dan Kebijakan yang Berkembang

Telly H.I. Kondo

(Politeknik Negeri Manado)

Abstract

Tourism Activity is one of the largest industry in the world. Developing activities involve many parties which completed and benefits to each other. even recognized there was a shift function and the debate over the definition paradigma but efforts remain empowered because Indonesia has the potential for ecotourism. Concepts and policies adopted to express understanding, so that the management of natural resources and tourism actors fully realize the benefits and functions of what ecotourism really is.



dok lestari

Kata kunci: ekowisata, konsep dan kebijakan

Pendahuluan

Pergeseran nilai dan fungsi pariwisata yang kadang tidak terkontrol dan terkendali memotivasi untuk membuat konsep dan kebijakan pembangunan pariwisata yang baru. Artinya kegiatan pariwisata yang tadinya mengutamakan manfaat ekonomi, kini berkembang jauh terkait tentang perlindungan terhadap

semua potensi termasuk sumber daya alam dan lingkungan, pelengkap paket pariwisata meliputi: akomodasi, transportasi, budaya dan sejarah bahkan kepada perilaku calon wisatawan.

Ekowisata dengan berbagai definisi yang dikemukakan pada akhirnya memiliki karakteristik dan spesifikasi sendiri yaitu menyangkut kepedulian terhadap pelestari

rian lingkungan dan pemberi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Sehingga prinsip-prinsip kegiatan pengelolaan ekowisata meliputi : (1) berbasis pada alam, (2) menekankan pada kegiatan konservasi, (3) mengacu pada pembangunan pariwisata berkelanjutan, (4) berkaitan dengan pembangunan pendidikan, (5) mengakomodasi budaya lokal dan (6) memberi manfaat pada ekonomi lokal.

Harus diakui perkembangan pada sektor pariwisata seringkali menimbulkan kritik dan kontroversi, sehingga muncul pula paradigma tentang persepsi dari perkembangan pariwisata itu sendiri. Hal ini memotivasi dan menuntun dalam membuat konsep dan kebijakan untuk lebih jauh harus memperhatikan aspek-aspek penting yaitu : aspek ekologi, ekonomis, dan sosial budaya. Ini kemudian disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing yang pada akhirnya harus memberi kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD) dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Definisi Dan Konsep Ekowisata

Pengembangan pariwisata terlihat pada pemenuhan dua syarat utama yaitu : (1) memperhatikan kelestarian lingkungan dan (2) orientasi pada masyarakat lokal. Sehingga pariwisata berkelanjutan harus mencakup aspek ekonomi, ekologis, dan sosio kultural. Bahkan kegiatan pariwisata kembali pada "back to nature" dan melakukan konservasi lingkungan.

Kronologis berpikir dengan menghasilkan konsep ekowisata dilatarbelakangi demikian bahkan dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli dan organisasi dunia lewat kajian dan

analisis yang dalam. Definisi dan konsep itu lahir ternyata memiliki berbagai kesamaan lewat power point penting untuk pembangunan berkelanjutan lewat syarat-syarat yang harus dimiliki yaitu :

- 1). Secara ekologis berkelanjutan, yaitu pembangunan pariwisata tidak menimbulkan efek negatif bagi ekosistem setempat. Selain itu, konservasi merupakan kebutuhan yang harus diupayakan untuk melindungi sumberdaya alam dan lingkungan dari efek negatif kegiatan wisata.
- 2). Secara sosial dapat diterima, yaitu mengacu pada kemampuan penduduk lokal untuk menyerap usaha pariwisata (industri dan wisatawan) tanpa menimbulkan konflik sosial.
- 3). Secara kebudayaan dapat diterima, yaitu masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan turis yang cukup berbeda (*tourist culture*)
- 4). Secara ekonomis menguntungkan, yaitu keuntungan yang dapat didapat dari kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari syarat-syarat diatas akhirnya terjadi beberapa kategori jenis wisata yang berkembang, yang selanjutnya disebut ekowisata. Adapun jenis-jenis wisata tersebut meliputi: bisnis travel, wisata pantai, wisata pedesaan, wisata alam, dan wisata budaya.

Namun demikian hingga saat ini pengertian ekowisata masih diperdebatkan paling tidak dari 15 definisi yang ada yang dikemukakan oleh Fennel (1999), Fennel dan Eagles (1990), *The International Ecotourism Society* (1991) dan *World Convention Union* (1996) dan setelah tahun 1999 muncul seperti Wood (2002).

Fennel (1999) mendefinisikan

ekowisata sebagai wisata berbasis alam yang berkelanjutan dengan fokus pengalaman dan pendidikan tentang alam. Fennel dan Eagles (1990) sebelumnya mendefinisikan ekowisata merupakan wisata alam yang berfokus di daerah konservasi dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat lokal, konservasi dan pendidikan. *The International Ecotourism Society (TIES)* (1991), mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan bertanggungjawab untuk menik-mati keindahan alam yang menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Permasalahan Dalam Pengembangan Ekowisata

Potensi ekowisata baik darat maupun kawasan pesisir dan pulau-pulau belum dimanfaatkan secara optimal. Secara bersamaan kegiatan ekowisata di Indonesia belum berkembang walaupun merupakan salah satu sektor potensial sebagai sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Permasalahan yang muncul dalam usaha pengembangan ekowisata di Indonesia dari berbagai sumber adalah : (1) belum ada konsep yang sama tentang ekowisata oleh para stakeholders, (2) ekowisata masih dijadikan sebagai alat untuk promosi pariwisata, namun implemntasi dari prinsip-prinsip ekowisata masih kurang, (3) perhatian pemerintah untuk pengembangan ekowisata masih kurang, (4) kebijakan yang mendukung masih tumpang tindih, (5) terbatasnya akses yang diperlukan dalam pengelolaan ekowisata (informasi jaringan pasar dan infrastruktur), (6) terbatasnya peran serta masyarakat dan stakeholders

dalam pengembangan ekowisata, (7) meningkatnya degradasi SDA dan lingkungan karena kegiatan wisata (8) kegiatan wisata di lokasi konservasi mendorong tidak terkontrolnya kegiatan pembangunan, dan (9) pemandu yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan pelestarian lingkungan ekowisata (Hartoto, tt, 1995).

Konsep ekowisata yang belum disepakati memicu kurangnya komitmen dalam melaksanakan kegiatan ekowisata dan hal ini berdampak negatif pada pengguna lingkungan dan pelaku pengelola wisata dan pelaku wisata. Masalah lain dipicu adanya kebijakan dan peraturan pemerintah yang dikeluarkan tumpang tindih antar departemen terkait.

Membangun Ekowisata

Dengan dilatar belakangi terjadinya pergeseran nilai dan fungsi pariwisata, terjadinya perdebatan tentang definidi ekowisata serta tidak konsistennya pemerintah dalam aturan yang dikeluarkan bahkan perilaku pengelola dan pengguna potensi ekowisata, mendorong kesepakatan untuk melahirkan pemahaman yang sama tentang ekowisata sedunia (*The World Ecotourism Summit*) yang dise-lenggarakan di Kanada tanggal 19-22 Mei 2002.

Indonesia sebagai negara potensial ekowisata merespon positif dengan mencanangkan tahun 2002 sebagai tahun ekowisata di Indonesia. Tema yang diambil berfokus pada daerah pegunungan di daerah gunung berapi (Pidato Menpora, 2002).

Pada dasarnya penetapan pengelolaan suatu lokasi ekowisata harus melibatkan empat kementerian yaitu Menteri Negara

Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya. Keterlibatan empat Menteri ini akhirnya melahirkan aturan dan kebijakan di masing-masing bidang yang saling melengkapi dan memberi manfaat. Selanjutnya diikuti adanya aturan otonomi daerah, sehingga masing-masing daerah mengikuti perkembangan sesuai porsi daerah bersangkutan.

Namun demikian usaha terus diupayakan dalam pengembangan ekowisata di Indonesia paling tidak mengakomodir kepentingan masyarakat lokal dengan mempertimbangkan tentang lingkungan sekitar supaya tetap eksis soal kekayaannya guna pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan Ekowisata di Indonesia

Dilihat dari berbagai aspek Indonesia sangat baik dan potensial sekali dalam pengembangan ekowisata. Dari segi wilayah dan dari aspek budaya, sejarah dan sumber daya alam dan lingkungannya. Aspek-aspek tersebut unsur-unsur dasar dari ekowisata.

Hal ini juga didukung dengan pemberlakuan UU No.22 dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini menggambarkan bahwa usaha pengembangan daerah menjadi tanggungjawab daerah tersebut sehingga secara otomatis pemberdayaan potensi baik dari segi ekonomi, budaya dan sumberdaya alam secara maksimal harus dikelola untuk diberdayakan lewat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, sesuai kondisi dan karakteristik setiap daerah

Potensi Objek Wisata dan Kebijakan Pengelolaan yang Berkelanjutan

Pengelolaan ekowisata terdiri dari 3 bagian yang disatukan secara bersama dalam proses pelaksanaan yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi yang sifatnya terpadu.

Idealnya ekowisata di era otonomi memberikan peran pada masing-masing tingkat baik pusat, daerah dan tingkat grass root. Hal ini memberi kesempatan supaya pada daerah masing-masing masyarakat harus tanggap dan proaktif mengembangkan potensi yang ada. Kunci faktor pengembangan ekowisata terletak pada faktor internal, eksternal dan structural. Sehingga lewat konsep ekowisata yang berkelanjutan, pemerintah dapat berusaha mengembangkan pendapatan asli daerah memberi berbagai kesempatan kepada masyarakat sambil bersama menjaga kelestarian alam dan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

Daftar Pustaka

- Fennel David.A. 1999. Ecotourism: An Introduction Routledge, London and New York.
- Hartoto,D.I et.al.,2003. Ekowisata: Pembelajaran Dari Kalimantan Timur,Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Linberg. K, 1991. Policies for Maximising Nature Tourism's Ecological and Economic Benefits. World Resources Institute. Washington DC.
- WOOD. M.E.,2002. Principles, Practices & Policies for Sustainability, UNEP.
- WTO (World Tourism Organization),2002. Sustainable

LESTARI

ISSN 1978-452X



9 771978 452009